

DAFTAR ISI

Catatan Redaksi.....	iii-iv
Abstrak.....	v-ix
Articulation of Indonesia’s Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflict <i>Isep Parid Yahya</i>	111-129
Pragmatisme Multilateral dalam Momen Keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022-2023 <i>Mohamad Rosyidin</i>	131-152
Taiwan’s Digital Public Diplomacy Towards Indonesia in Supporting its New Southbound Policy <i>Rika Isnarti</i>	153-167
Tantangan Kebijakan <i>Affirmative Action</i> sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif <i>Rahma Ning Tias, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra,</i> <i>Ferdian Ahya Al Putra, Septyanto Galan Prakoso</i>	169-189
Kepentingan Ekonomi Politik Usaha Kecil di Malioboro, Yogyakarta <i>Anggalih Bayu Muh Kamim</i>	191-216
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Politica* edisi November 2023 menyajikan 5 (lima) artikel hasil kajian dan penelitian yang secara spesifik membahas masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan isu politik dalam negeri dan hubungan internasional. Kelima artikel tersebut membahas topik-topik yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia bebas-aktif, keketuaan Indonesia di G-20 dan ASEAN 2022–2023, diplomasi publik digital Taiwan terhadap Indonesia, upaya penguatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan kepentingan ekonomi politik usaha kecil.

Artikel pertama, ditulis oleh Isep Parid Yahya, menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia dan Ukraina. Dengan mengusung politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengambil sikap tegas terhadap perang Rusia-Ukraina serta melanjutkan kepemimpinan di G20 dan ASEAN. Hasil analisis penulis menemukan bahwa Indonesia menampilkan tiga wajah politik luar negeri terhadap perang Rusia-Ukraina. Pertama, teguh pada penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB terutama prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; kedua, menjalankan politik luar negeri bebas-aktif dengan mengintegrasikan dua blok yang berseberangan; ketiga, menjalankan kebijakan luar negeri yang menguntungkan bagi kepentingan domestik dan keuntungan ekonomi.

Artikel kedua, ditulis oleh Mohamad Rosyidin, menganalisis pragmatisme multilateral dalam momen keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022–2023. Dalam artikel ini disebutkan bahwa diplomasi multilateral sering kali diasosiasikan dengan upaya kolektif untuk memecahkan aneka persoalan di tingkat regional atau global. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diplomasi multilateral Indonesia menekankan pada pencapaian kepentingan nasional ketimbang kepentingan kolektif. Menggunakan studi kasus presidensi Indonesia di G20 dan ASEAN, artikel ini mengemukakan argumen bahwa diplomasi multilateral Indonesia di kedua forum tersebut didominasi prinsip pragmatisme. Prinsip pragmatisme multilateral ini dapat melemahkan reputasi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang diharapkan dapat berkontribusi bagi pemecahan masalah-masalah global.

Artikel ketiga, ditulis oleh Rika Isnarti, menganalisis diplomasi publik digital Taiwan di Indonesia dan umumnya di negara-negara ASEAN dalam mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan Taiwan. Hasil analisis penulis menemukan bahwa diplomasi publik digital Taiwan mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan terhadap Indonesia dalam hal, tetapi tidak terbatas pada, pembagian sumber daya, pertukaran orang-ke-orang, dan mempromosikan hubungan kelembagaan. Ini memenuhi efisiensi dan tujuan diplomasi digital. Diplomasi digital Taiwan dapat mencapai penetapan agenda dan perluasan kehadirannya tetapi terbatas pada optimalisasi dalam menghasilkan percakapan. Platform media yang digunakan dalam diplomasi digital Taiwan tersebut, dapat memenuhi tujuan diplomasi digital yaitu penyampaian informasi, layanan konsuler, dan keterlibatan serta memperluas jaringan.

Artikel keempat, yang ditulis bersama oleh lima penulis (Rahma Ning Tias, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, dan Septyanto Galan Prakoso), menganalisis upaya penguatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui kebijakan affirmative action. Penguatan keterwakilan perempuan (paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD) merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan *affirmative action* untuk

perempuan di lingkup politik. Kebijakan afirmatif ini membuahkan hasil berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari periode ke periode. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan tersebut tidak sejalan dengan kontribusi mereka. Kebijakan afirmatif belum memaksimalkan peran perempuan di lembaga legislatif, yakni kapasitas perempuan yang belum maksimal, budaya patriarki, serta keterwakilan perempuan sebagai formalitas.

Artikel terakhir, yang kelima, ditulis oleh Anggalih Bayu Muh Kamim, menganalisis perihal kepentingan ekonomi politik usaha kecil di Malioboro, Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa tumbuhnya usaha kecil di Malioboro sejak abad ke 18 berkaitan dengan komodifikasi ruang perkotaan dimulai di sekitar Pasar Gedhe dan berlanjut di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan secara masif dan tumbuhnya turisme, yang didorong oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19, telah mendorong munculnya fenomena “kota wirausaha” di Malioboro ditandai dengan maraknya usaha kecil. Sejak 1970-an, usaha kecil semakin tumbuh dan membangun organisasi untuk mempertahankan penghidupan, usaha dan bisnisnya yang bersifat musiman, serta untuk menjaga citra destinasi wisata Malioboro demi keberlangsungan usaha mereka.

Demikian lima artikel yang tersaji dalam jurnal *Politica* edisi November 2023. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan masukan terhadap semua artikel yang masuk. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seksi editor yang telah bekerja keras membantu terselenggaranya penerbitan jurnal ini. Kami berharap kelima artikel yang tersaji dalam jurnal ini berguna bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Selamat membaca.

Jakarta, November 2023
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Isep Parid Yahya

Articulation of Indonesia's Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflict

This study is about Indonesia's foreign policy in responding to the Russian and Ukrainian conflict. The war in Ukraine has attracted wide attention and influenced many country's foreign policy, including Indonesia as one of the middle powers in Asia. The conflict has sharpened the bipolarization between Ukraine supported by Western countries and Russia itself. It presents serious challenges for Indonesia, which has long been known as a neutral and non-aligned country. Under the free-active foreign policy doctrine, Indonesia is facing serious challenges to take a firm stance on the Russian-Ukrainian war and continuing its leadership in the G20 and ASEAN. Therefore, this study seeks to analyze Indonesia's foreign policy behavior and its country's role it has built in dealing with the Russian-Ukrainian conflict. By using role theory of foreign policy analysis and qualitative research methods especially textual analysis, this study finds that Indonesia displays three faces of foreign policy toward Russia-Ukraine war. First, steadfast commitment and respect to international law and the UN Charter, especially sovereignty and territorial integrity; Second, articulate free-active foreign policy attitude that integrates two opposing blocks; Third, pursue foreign policy that is advantageous for domestic interests and economic gains.

Keywords: Foreign Policy; Bebas-Aktif; Russia-Ukraine Conflict; Economic Diplomacy; Domestic Politics

Isep Parid Yahya

Artikulasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif dalam Merespon Konflik Rusia-Ukraina

Studi ini merupakan penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia dan Ukraina. Perang di Ukraina telah menarik perhatian luas dan mempengaruhi kebijakan luar negeri banyak negara termasuk Indonesia sebagai salah satu negara-negara kekuatan menengah di Asia. Konflik ini telah mempertajam bipolarisasi antara Ukraina yang didukung oleh negara-negara Barat dan Rusia sendiri. Situasi politik ini memberikan tantangan serius bagi Indonesia yang telah lama dikenal sebagai negara netral dan non-aliansi. Dengan mengusung politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengambil sikap tegas terhadap perang Rusia-Ukraina serta melanjutkan kepemimpinan di G20 dan ASEAN. Karena itu, studi ini bermaksud untuk menganalisis perilaku politik luar negeri RI dan peran yang dibangun dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina. Dengan menggunakan teori peran dalam analisa kebijakan luar negeri dan metode riset kualitatif analisis teks, studi ini menemukan bahwa Indonesia menampilkan tiga wajah politik luar negeri terhadap perang Rusia-Ukraina. Pertama, teguh pada penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB terutama prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; kedua, menjalankan politik luar negeri bebas-aktif mengintegrasikan dua blok yang berseberangan; ketiga, menjalankan kebijakan luar negeri yang menguntungkan bagi kepentingan domestik dan keuntungan ekonomi.

Kata kunci: Politik Luar Negeri; Bebas-Aktif; Konflik Rusia-Ukraina; Diplomasi Ekonomi; Politik Domestik.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Mohamad Rosyidin

Multilateral Pragmatism in The Moment of Indonesia's G20 and ASEAN Presidency, 2022-2023

Most international relations literature conceives a positive viewpoint on multilateralism. Multilateral diplomacy is often associated with collective efforts to solve various problems at the regional or global level. Indonesia has long practiced multilateral diplomacy as part of its commitment to create a better world as mandated by the constitution. However, under the leadership of President Joko Widodo (Jokowi), Indonesia's multilateral diplomacy puts a strong emphasis on achieving national rather than collective interests. Using a case study of Indonesia's G20 and ASEAN presidency, this article argues that Indonesia's multilateral diplomacy was dominated by the principle of pragmatism which is oriented towards the pursuit of short-term interests, especially the economy, rather than strategic efforts to solve international problems. This principle of multilateral pragmatism undermines Indonesia's reputation as a middle power which is expected to contribute to solving global problems.

Keywords: Multilateral Diplomacy; Indonesia's G20 and ASEAN Presidency; Multilateral Pragmatism.

Mohamad Rosyidin

Pragmatisme Multilateral dalam Momen Keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022-2023

Kebanyakan literatur hubungan internasional memandang secara positif tentang multilateralisme. Diplomasi multilateral sering kali diasosiasikan dengan upaya kolektif untuk memecahkan aneka persoalan di tingkat regional atau global. Indonesia sejak lama mempraktikkan diplomasi multilateral sebagai bagian dari komitmen menciptakan dunia yang lebih baik sebagaimana amanat konstitusi. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diplomasi multilateral Indonesia menekankan pada pencapaian kepentingan nasional ketimbang kepentingan kolektif. Menggunakan studi kasus presidensi Indonesia di G20 dan ASEAN, artikel ini mengemukakan argumen bahwa diplomasi multilateral Indonesia di kedua forum tersebut didominasi prinsip pragmatisme yang berorientasi pada pengejaran kepentingan jangka pendek terutama ekonomi alih-alih upaya strategis memecahkan persoalan internasional. Prinsip pragmatisme multilateral ini dapat melemahkan reputasi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang diharapkan dapat berkontribusi bagi pemecahan masalah-masalah global.

Kata Kunci: Diplomasi Multilateral; Presidensi Indonesia di G20 dan ASEAN; Pragmatisme Multilateral.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Rika Isnarti

Taiwan's Digital Public Diplomacy Towards Indonesia in Supporting its New Southbound Policy

This research aims to analyze Taiwan's digital public diplomacy to Indonesia and generally in ASEAN countries in supporting Taiwan's New Southbound Policy. It concerns elaborating and assessing to what extent digital diplomacy can assist Taiwan in achieving its new southbound policy goals and its limitations. This paper assesses Taiwan government's social media, especially the Ministry of Foreign Affairs official social media and other digital media platforms that have been used to promote and inform New Southbound Policy and the president's social media accounts. It employs digital diplomacy in International Relations as a conceptual framework that is part of public diplomacy. This research is a qualitative content analysis, that analyzed terms such as New Southbound Policy, Indonesia, and Taiwan. The study found that Taiwan's digital public diplomacy support its New Southbound Policy towards Indonesia in term of, but is not limited to, resource sharing, people-to-people exchange, and promoting institutional links. It meets digital diplomacy efficiency and objectives. Taiwan's digital diplomacy can achieve its agenda-setting and presence expansion but limited in generating optimal consensation. Those media platforms used in Taiwan's digital diplomacy, can meet digital diplomacy objectives that are delivery of information, consular service, and engagement and expand the network.

Keywords: Taiwan; Indonesia; New Southbound Policy; Digital Diplomacy; Social Media.

Rika Isnarti

Diplomasi Publik Digital Taiwan terhadap Indonesia dalam Mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi publik digital Taiwan di Indonesia dan umumnya di negara-negara ASEAN dalam mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan Taiwan. Ini berkaitan untuk menguraikan dan menilai sejauh mana diplomasi digital dapat membantu Taiwan dalam mencapai tujuan Kebijakan Baru Arah Selatan dan keterbatasannya. Tulisan ini menilai media sosial pemerintah Taiwan, khususnya media sosial resmi Kementerian Luar Negeri dan platform media digital lainnya yang telah digunakan untuk mempromosikan dan menginformasikan Kebijakan Baru Arah Selatan dan akun media sosial presiden. Ini menggunakan diplomasi digital dalam Hubungan Internasional sebagai kerangka konseptual yang merupakan bagian dari diplomasi publik. Penelitian ini merupakan analisis konten kualitatif, yang menganalisis istilah-istilah seperti Kebijakan Baru Arah Selatan, Indonesia, dan Taiwan. Studi ini menemukan bahwa diplomasi publik digital Taiwan mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan terhadap Indonesia dalam hal, tetapi tidak terbatas pada, pembagian sumber daya, pertukaran orang-ke-orang, dan mempromosikan hubungan kelembagaan. Ini memenuhi efisiensi dan tujuan diplomasi digital. Diplomasi digital Taiwan dapat mencapai penetapan agenda dan perluasan kehadirannya tetapi terbatas pada optimalisasi dalam menghasilkan percakapan. Platform media yang digunakan dalam diplomasi digital Taiwan tersebut, dapat memenuhi tujuan diplomasi digital yaitu penyampaian informasi, layanan konsuler, dan keterlibatan serta memperluas jaringan.

Kata Kunci: Taiwan; Indonesia; Kebijakan Baru Arah Selatan; Diplomasi Digital; Media Sosial.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Rahma Ning Tias, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, Septyanto Galan Prakoso

Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature

The idea of at least 30% representation of women in nominations for DPR and DPRD members is a form of state's effort to provide affirmative action for women in the political sphere. The state's efforts to provide affirmative action for women in the political sphere aim to strengthen women's representation in the legislature. This affirmative action increased women's representation in the legislative from period to period. Even in the 2019-2024 period, the percentage of women in the DPR was 20% or 118 seats out of the total number of members, which is the first time that women's representation in the DPR has reached this figure. However, the increase in women's representation in the DPR is not in line with their contribution in the field of legislation. Descriptive qualitative research methods with library study data collection techniques were used to provide a comprehensive picture of the situation in accordance with the facts at the time the research was conducted, with an emphasis on the challenges of affirmative action policies. This article aims to analyze the challenges of the government's affirmative action policy in the form of a minimum quota for women in nominations for DPR members of at least 30% as an effort to strengthen women's representation in the legislature. The results found relate to the challenges of affirmative action that have not maximized the role of women in legislative institutions: women's capacity that has not been maximized, patriarchal culture, and women's representation as a formality.

Keywords: Affirmative Action; Women Representation; Legislative; Challenge.

Rahma Ning Tias, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, Septyanto Galan Prakoso

Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Gagasan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik. Upaya negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik bertujuan untuk menguatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmatif ini kemudian membuahkan hasil berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari periode ke periode. Bahkan di periode 2019-2024 persentase perempuan di DPR sebesar 20% atau sebanyak 118 kursi dari total jumlah anggota, yang mana ini pertama kalinya keterwakilan perempuan di DPR menyentuh angka tersebut. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tidak sejalan dengan kontribusi mereka di bidang legislasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi yang sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan, dengan penekanan pada tantangan kebijakan affirmative action. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan affirmative action pemerintah berupa kuota minimal perempuan dalam pencalonan anggota DPR minimal 30% sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan di legislatif. Hasil yang ditemukan sehubungan dengan tantangan kebijakan affirmative action yang belum memaksimalkan peran perempuan di lembaga legislatif yakni kapasitas perempuan yang belum maksimal, budaya patriarki, serta keterwakilan perempuan sebagai formalitas.

Kata kunci: Kebijakan Afirmasi; Keterwakilan Perempuan; Legislatif; Tantangan.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Anggalih Bayu Muh Kamim

The Political Economy of Small Enterprises in Malioboro, Yogyakarta

This study is aimed to explore the vulnerability of small enterprises in Malioboro that depend on mass tourism. The research question is how did the political economy of small enterprises in Malioboro change? Data collection was carried out by in-depth online interviews with small enterprise actors in Malioboro due to the Covid-19 pandemic situation. Data was also collected through searches of journal articles, manuscripts, government reports, online media reports, and books related to economic development of Malioboro. The results of the study show that the growth of small enterprises in Malioboro since the 18th century is related to the commodification of urban space around Pasar Gedhe. Massive development of urban infrastructure and the growth of tourism driven by the colonial government since the 19th century have encouraged the emergence of the “entrepreneurial city” phenomenon in Malioboro marked by the proliferation of small enterprises. The crisis in 1930 and the war for independence in 1945-1949 disrupted the economy in Malioboro, but did not kill small enterprises. After the 1970s, small enterprises grew and built organizations to sustain their livelihoods. Small businesses with their respective organizations seek to build connection with the ruling class to maintain their seasonal business. Small enterprises don’t even hesitate to fight with each other. The clash of small enterprises is getting tougher after Malioboro’s revitalization project in 2016 to maintain the image of a tourist destination, for business continuity.

Keywords: Small Enterprises; Vulnerability; Tourism; Political Economy; Livelihood.

Anggalih Bayu Muh Kamim

Kepentingan Ekonomi Politik Usaha Kecil di Malioboro, Yogyakarta

Kajian ini bertujuan untuk menggali kerentanan usaha kecil di Malioboro yang bergantung pada turisme massal. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana perubahan ekonomi politik usaha kecil di Malioboro? Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara daring kepada pelaku usaha kecil di Malioboro disebabkan situasi pandemi Covid-19. Data dikumpulkan pula melalui penelusuran atas artikel jurnal, manuskrip, laporan pemerintahan, pemberitaan media daring dan buku yang terkait dengan perkembangan ekonomi di Malioboro. Hasil kajian menunjukkan bahwa tumbuhnya usaha kecil di Malioboro sejak abad ke 18 berkaitan dengan komodifikasi ruang perkotaan dimulai di sekitar Pasar Gedhe dan berlanjut di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan secara masif dan tumbuhnya turisme didorong oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19 telah mendorong munculnya fenomena “kota wirausaha” di Malioboro ditandai dengan maraknya usaha kecil. Krisis tahun 1930 dan perang kemerdekaan tahun 1945-1949 sempat mengganggu perekonomian di Malioboro, tetapi tak serta merta mematikan usaha kecil. Pasca tahun 1970-an, usaha kecil semakin tumbuh dan membangun organisasi untuk mempertahankan penghidupannya. Usaha kecil dengan masing-masing organisasinya berupaya membangun koneksi dengan kelas penguasa untuk mempertahankan bisnisnya dalam menjaga usahanya yang bersifat musiman. Usaha kecil bahkan tak segan untuk berseteru dengan sesamanya dan semakin keras bertarung pasca penataan Malioboro pada tahun 2016 untuk menjaga citra destinasi wisata, demi keberlangsungan usaha.

Kata kunci: Usaha Kecil; Kerentanan; Turisme; Ekonomi Politik; Penghidupan.